

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa, Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Kepala BKKBN Perwakilan D.I Yogyakarta No. 170//KB.09.01/J3/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Pelayanan KB MKJP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR FASILITAS KESEHATAN (FASKES) PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB) YANG MENJADI TEMPAT PELAYANAN KB YANG DIBIYAI MELALUI DANA BOKB TAHUN 2021.

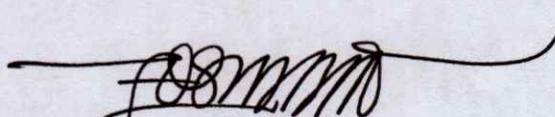
KESATU : Menetapkan Daftar Fasilitas Kesehatan Praktik Mandiri Bidan yang menjadi tempat pelayanan KB yang dibiayai Dana BOKB tahun 2021 di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala DP3AP2KB ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK BOKB Kota Yogyakarta Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA,



Ir. EDY MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006

Paraf Hirarki		
Pejabat	Paraf	Tanggal
Sekdin		25/21
Kabid KBPK		
Kasi KB		

Tembusan Yth.

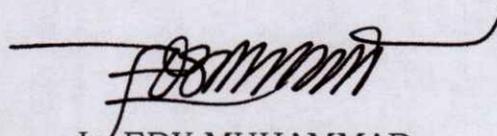
1. IBI Cabang Kota Yogyakarta
2. Ybs

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 479/040/KPTS/DP3AP2KB/11/2021
TENTANG PENETAPAN DAFTAR FASILITAS KESEHATAN
PRAKTIK MANDIRI BIDAN YANG MENJADI TEMPAT PELAYANAN
KB YANG DIBIYAI MELALUI DANA BOKB TAHUN 2021

PENETAPAN DAFTAR FASILITAS KESEHATAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN YANG
MENJADI TEMPAT PELAYANAN KB YANG DIBIYAI MELALUI DANA BOKB TAHUN
2021.

NO	KODE FASKES	NAMA FASKES PMB	ALAMAT
1.	34-71-068	PMB POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA	Jl. Mangkuyudan MJ III/304 Mantrijeron
2.	34-71-078	PMB DIAN HERAWATI	Jl. Nakula No.53 Ketanggungan Wirobrajan
3.	34-71-077	PMB MELATI IBI	Gedongan RT.05/RW.02 Kel. Purbayan Kotagede

KEPALA DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA,



Ir. EDY MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006

Paraf Hirarki		
Pejabat	Paraf	Tanggal
Sekdin		15/21
Kabid KBPK		
Kasi KB		